



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (L K I P) TAHUN 2023



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. C. Lt. IV

Telp/ Fax (022) 6631787, Website: www.cimahikota.go.id

email : dinasdpkpcimahi@gmail.com Kota Cimahi 40513

Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP), yang dilaksanakan kegiatannya dalam kurun waktu satu tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 ini merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai media informasi dan media komunikasi pertanggung jawaban dengan perhitungan prestasi selama satu tahun pada Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 menguraikan Rencana Strategis Tahun 2023–2026 dan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2023-2026, Penetapan Kinerja Tahun 2023, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, Pengukuran Kinerja, Akuntabilitas Keuangan serta Analisis Efisiensi dan Efektivitas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 8.237.921.335,00** terealisasi pendapatan sampai akhir tahun 2022 sebesar **Rp. 9.490.770.601,00** atau setara dengan **115,21%**. Realisasi pendapatan di Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar **2,52%**. Adapun pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (UPTD Rusunawa), Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengelolaan Air Limbah Cair (UPTD Air Limbah Domestik), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Minum.

Total Belanja Daerah DPKP Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar **Rp. 94.146.487.286,00** progres ketercapaian keuangan sebesar **Rp. 88.697.071.205,00** atau setara dengan **94,21%**. Sedangkan tingkat pencapaian fisik mencapai **99,66%**. Pencapaian program kegiatan sudah berjalan maksimal dengan berbagai hambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta lebih dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cimahi, 18 Maret 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAHI**

ENDANG, S.IP., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197006241998031009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum dan Isu Strategis.....	1
1.1.1 Gambaran Umum	1
1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.3 Susunan Organisasi	3
1.1.4 Dasar Hukum	5
1.2 Isu Strategis.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	9
2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	9
2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	10
2.1.3 Program dan Kegiatan	15
2.2 Perjanjian Kinerja	20
2.3 Anggaran Kegiatan Tahun 2023	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	20
3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	24
3.2 Analisis Capaian Kinerja	26
3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	26
3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	31

3.2.3	Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023-2026	34
3.2.4	Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kerja Nasional	35
3.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
3.4	Realisasi Anggaran	36
3.4.1	Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	37
3.4.2	Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung.....	38
3.4.3	Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja	43

BAB IV PENUTUP

4.1	Penutup	51
-----	---------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra DPKP Kota Cimahi Tahun 2023-2026	13
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama DPKP Kota Cimahi	14
Tabel 2.3	Keterkaitan Sasaran dan Program Yang Mengacu Pada Renstra DPKP Tahun 2023-2026	18
Tabel 2.4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	16
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja DPKP Tahun 2023	20
Tabel 2.6	Program dan Anggaran DPKP Tahun 2023	21
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	23
Tabel 3.2	Pencapaian Tujuan DPKP Tahun 2023	25
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja	25
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran ke-1 Berkurangnya Luasan Banjir	26
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran ke-2 Meningkatnya Kualitas Permukiman	28
Tabel 3.6	Analisi Pencapaian Sasaran ke-3 Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	28
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran ke-3 Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Ruang di Kota Cimahi	30
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja DPKP Tahun 2023 dengan Tahun 2022	32
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja DPKP Tahun 2023 dengan Target Kinerja Renstra DPKP Tahun 2023-2026	34
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	35
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Pendapatan	37
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja	38
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Belanja Operasi	39
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran Belanja Modal	41
Tabel 3.15	Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan	44

DAFTAR LAMPIRAN

- L.1 SK Tim Penyusun Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023
- L.2 Formulir Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- L.3 Formulir Pelayanan Rumah Layak Huni Kota Cimahi 2023
- L.4 Formulir Pelayanan Lingkungan Permukiman Kumuh Kota Cimahi 2023
- L.5 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Cimahi 2023
- L.6 Formulir Pelayanan Rumah Tangga Bersanitasi Kota Cimahi 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dan Isu Strategis

1.1.1. Gambaran Umum

Dengan telah berubahnya status Kota Cimahi dari kota administratif menjadi kota otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Cimahi, maka beban kerja dan permasalahan Kota Cimahi harus ditangani oleh organisasi setingkat Kota. Dalam periode pelaksanaan Program Pembangunan 2012–2017 telah terjadi perubahan masif terhadap Pemerintah Kota Cimahi dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2008, sehingga berdampak pada kedudukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi. Perubahan yang terjadi yaitu tugas pokok dan fungsi DLH terbagi menjadi tanggungjawab dua instansi yaitu Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK).

Kedudukan Dinas Penyehatan Lingkungan dan Kebersihan (DPLK) dirubah menjadi Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi pada Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi.

Pada Tahun 2018 kedudukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Cimahi mengalami perubahan menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kota Cimahi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai tugas melaksanakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 28. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi (DPKP) mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Walikota untuk merumuskan kebijakan teknis untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup melalui pelaksanaan :

1. Perumusan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan Kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

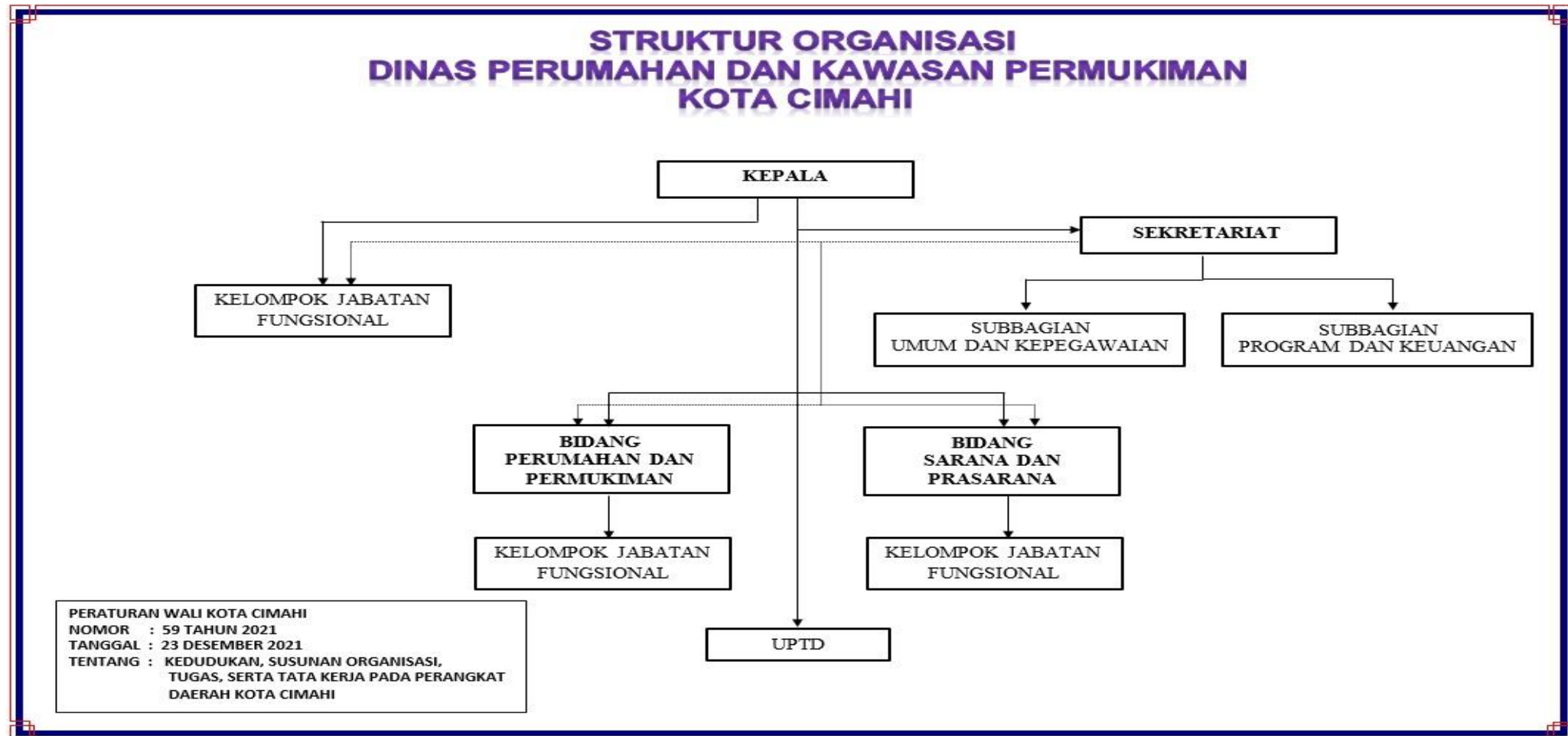
1.1.3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman
 - b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota
 - c. Seksi Drainase Kota
4. Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, membawahi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas
 - b. Seksi Air Bersih
 - c. Seksi Air Limbah
5. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Air Bersih/ Air Minum;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan RUSUNAWA;
8. Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelolaan Pemakaman.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi



1.1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 mengacu kepada dasar hukum, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012-2017;
 17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota.

1.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah / masyarakat di masa yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023-2026 di masing-masing sector sebagai berikut :

1. Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman

Arahan Presiden Indonesia terkait RPJMN tahun 2020-2024 yang berkaitan langsung dengan *Sustainable Development Goals*

(SDGs) tujuan 6 (enam) dan 11 (sebelas) adalah pembangunan infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perkotaan. Berikut intisari dari permasalahan dan isu strategis bidang perumahan dan Permukiman di DPKP Kota Cimahi :

- A. Peningkatan layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi;
- B. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan penyediaan rumah murah karena mahalnnya harga tanah/ lahan;
- C. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang khususnya dalam hal yang terkait dengan penataan kawasan permukiman serta alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan yang lain.

2. Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana

Permasalahan dan isu strategis diperoleh dari hasil analisis terhadap kondisi eksisting Kawasan perumahan dan permukiman di Kota Cimahi, serta dari hasil masukan SKPD terkait yang dilakukan melalui pelaksanaan FGD (Focus Group Discussion). Adapun permasalahan pokok / isu strategis pada masing – masing sector bidang infrastruktur permukiman DPKP Kota Cimahi antara lain:

1) Sektor Air Minum

- A. Kualitas air baku rendah dan kuantitas air baku berfluktuasi di beberapa tempat;
- B. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan pemusatan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal;
- C. Keterbatasan pendanaan APBD untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum;
- D. Lambannya program penyediaan SPAM regional;
- E. Peningkatan layanan air bersih perpipaan belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

2) Sektor Air Limbah Domestik

- A. Cakupan pelayanan air limbah domestik (sanitasi) belum optimal dan masih perlu ditingkatkan dengan melihat target Universal access/SDG;

- B. Masih tingginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABS);
- C. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama menyangkut limbah;
- D. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat;
- E. Masih rendahnya tingkat pelayanan limbah terpusat;
- F. Tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terolah di IPAL dan IPLT dan/atau kebocoran tangki;
- G. Terbatasnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestic;
- H. Penyedotan lumpur tinja oleh UPT ALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot;
- I. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPT ALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja.

3) Sektor Drainase

- A. Ketidakmampuan badan air penerima dalam menampung air limpasan;
- B. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi;
- C. Penyumbatan/ Tidak mengalirnya saluran;
- D. Belum optimalnya penanganan terhadap daerah rawan banjir;
- E. Belum kuatnya dukungan pengelolaan sistem drainase.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi tahun 2023-2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan terhadap perkembangan Kota Cimahi, sehingga dampak positif dan manfaat pembangunan yang direncanakan dapat dirasakan khususnya bagi masyarakat Cimahi dan Jawa Barat pada umumnya.

Rencana Strategis Tahun 2023-2026 merupakan acuan strategis program dan panduan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi pada tahun 2023-2026 Rencana Strategis Tahun 2023-2026 membahas visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

2.1.1 Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, semua Provinsi serta Kabupaten dan Kota wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, untuk periode waktu 2005 – 2025. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka pada masa transisi ini penentuan Visi dan Misi didasarkan pada Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Untuk menjaga kesinambungan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 mengacu pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan jangka panjang Kota Cimahi adalah : **“CIMAHI KOTA CERDAS”**, yang dijabarkan sebagai berikut:

- A. *Creative* yang berarti dapat berkreasi dalam bentuk aslinya serta produktif;
- B. *Egalitarian* yang berarti memandang kesamaan derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang berkembang di negara kita;
- C. *Religious* adalah sifat kota yang agamis mengamalkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen;
- D. *Developable* diartikan sebagai kota yang berkemampuan kompetitif untuk dibangun,
- E. *Accretive* diartikan sebagai kota memiliki nilai tambah untuk terus maju dan berkembang;
- F. *Sustainable* adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

2.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dengan demikian visi CIMAHI KOTA “CERDAS” adalah mewujudkan kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul serta dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdayasaing untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik. Untuk mencapai visi RPJPD tersebut ditetapkan 5 (lima) Misi jangka panjang Kota Cimahi, yaitu :

- A. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;

- B. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- C. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;
- D. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;
- E. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Kurun waktu tahun 2023-2026 merupakan pembangunan tahap kelima dalam RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yang mana dalam kurun waktu tersebut akan dilakukan Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Pada tahap ini upaya untuk mencapai keunggulan masyarakat Kota Cimahi dalam segala bidang terus ditingkatkan. Pencapaian keunggulan tersebut berarti masyarakat Kota Cimahi memiliki daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah lain. Dalam tahap ini akan dilaksanakan upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditandai oleh semakin tingginya solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, semakin tingginya pendapatan dan kemandirian masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta makin membaiknya kinerja pengelolaan SDM yang handal.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tersurat dan tersirat dalam Misi 5 (lima) sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu:

**“Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai Daya
Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”.**

Misi kelima ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka hijau, konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi. Kerusakan lingkungan hidup mengakibatkan biaya hidup meningkat

yang pada gilirannya menurunkan kualitas hidup. Lingkungan hidup yang rusak juga diduga menyebabkan munculnya penyakit epidemik maupun endemik. Upaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan diarahkan pada : pertama, pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang dicerminkan oleh :

- A. tetap terjaga fungsi dan daya dukung lingkungan dan
- B. kemampuan pemulihan tanah, air dan udara dalam mendukung kualitas kehidupan secara serasi, seimbang dan lestari; kedua, memelihara kekayaan keragaman jenis flora dan fauna dicerminkan oleh : nilai tambah, daya saing kota dan modal pembangunan kota, serta ketiga, meningkatnya kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota.

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra DPKP Kota Cimahi Tahun 2023-2026, DPKP memiliki tiga Indikator Kinerja Utama dan satu indikator penunjang urusan pemerintahan. Keterkaitan misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra DPKP Kota Cimahi Tahun 2023-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Opini BPK	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP
MISI V : Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Yang Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Berkurangnya luasan banjir	Persentase Luasan Banjir
			Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh
			Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang di Kota Cimahi	Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan

Dengan telah ditetapkan Indiktor Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada Rancangan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra DPKP Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka IKU DPKP Kota Cimahi mengalami perubahan dari IKU tahun 2022.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama DPKP Kota Cimahi

INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2017-2022)	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2023-2026)
1. Persentase Rumah Layak Huni	1. Persentase Luasan Banjir
2. Rasio Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	2. Rasio Luas Kawasan Kumuh
3. Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	3. Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan
4. Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	4. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP

Adapun keterkaitan sasaran, program dan indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Keterkaitan Sasaran dan Program Yang Mengacu Pada Renstra DPKP Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
1	Berkurangnya Luasan Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentasi Kapasitas Sungai Dan Bangunan Penampung Air
			Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat
2	Meningkatnya Kualitas Pemukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainas	Persentase Luas Genangan Di Daerah Rawan Genangan Dan Di Daerah Tidak Rawan Genangan

No	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Korban Bencana Yang Dibangun/ Direhabilitasi
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Ppks Yang Mendapatkan Pelayanan Dasar Rutilahu
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Sarana Permukiman Yang Tersedia Psu Penunjang Fungsi Hunian
3	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Perencanaan Ruang Di Kota Cimahi	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Yang Difasilitasi
4	Meningkatkan Kualitas Dan Inovasi Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah
			Nilai Ikm Perangkat Daerah
			Indeks Profesionalitas Asn

2.1.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka perwujudan pencapaian pelaksanaan dan pembangunan di bidang Perumahan dan Permukiman, pada tahun 2023 DPKP memiliki **9 Program 19 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan**, yang menyangkut aspek teknis (penyelenggaraan pembangunan fisik/non fisik) dan aspek non teknis (penyelenggaraan pemerintahan). Berikut ini uraian pelaksanaan kegiatan Dinas pada tahun 2023 :

Tabel 2.4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah Kab/Kota
	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
	2	Rehabilitasi Tanggul Sungai
	3	Normalisasi/Restorasi Sungai
	4	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
	5	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi
	6	Operasi dan Pemeliharaan Sungai
	2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha
	1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
	2	Rehabilitasi Bendung Irigasi
	3	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota
	4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM
	5	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Perkotaan
	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	8	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
	9	Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan (BLUD Air Minum)
	10	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	
	4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
	12	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
	13	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
	14	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
	15	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik
	16	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
	17	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	18	Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPTD ALD)
	19	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja (UPTD ALD)
	20	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (UPTD ALD)
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	5	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
	21	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
	22	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan
	23	SupervisiPembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem DrainasePerkotaan
	24	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
	25	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
	26	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
	27	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan
	28	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	29	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	30	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	31	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	32	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
8	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
	33	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
9	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	34	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	35	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	36	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	37	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	38	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	39	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	40	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	41	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	42	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	45	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN		
		47	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		48	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah (UPTD Pemakaman)
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
	14	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		49	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
	15	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/atau Rumah Khusus	
		50	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun (UPTD RUSUNAWA)
7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
	16	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		51	Survei Dan Penetapan Lokasi Perumahan Permukiman Kumuh
		52	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
	17	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
		53	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
		54	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
	18	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
		55	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas, Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian (TAMAN)
		56	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (UTILITAS)
9	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
	19	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		57	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.2. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan permasalahan dan hasil Musyawarah Perencanaan Pengembangan (Musrenbang) se Kota Cimahi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah membuat perencanaan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul. Strategi jangka pendek tersebut dituangkan dalam rencana kerja tahunan berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan dasar dari pengukuran Penetapan Kinerja yang telah disusun pada Tahun Anggaran 2023, memuat indikator-indikator keluaran / output dan hasil / outcome yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Rincian Perjanjian kinerja dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Berkurangnya luasan banjir	Presentase Luasan Banjir	0,219%
2	Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,036%
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang di Kota Cimahi	Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan	100%
3	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	55 Nilai

2.3 Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Terwujudnya Pencapaian terhadap Visi dan Misi yang baik, di dukung oleh anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan dari program kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran

berdasarkan Program kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023.

Tabel 2.6
Program dan Anggaran DPKP Tahun 2023

NO	PROGRAM	Rp	ANGGARAN
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	5.777.753.021,00
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	19.438.599.202,00
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	Rp	12.089.106.059,00
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	5.803.512.728,00
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	14.309.706.819,00
7	Program Pengembangan Perumahan	Rp	3.900.253.550,00
8	Program Kawasan Permukiman	Rp	13.351.337.528,00
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	19.396.218.379,00
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	80.000.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp	94.146.487.286,00

Total rekapitulasi anggaran perubahan DPKP Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 94.146.487.286,00** (*Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*). Yang terbagi ke dalam 10 Program.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran / target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah secara periodik. Sehingga Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan perwujudan dari pelaksanaan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja sesuai misi dalam Rencana Strategis 2023-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Keberhasilan dan kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana

dalam kegiatan-kegiatan tahun 2023 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam tahun 2023 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi

Capaian Indikator = ----- X 100 %

Rencana

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi – (Realisasi Rencana)

Capaian Indikator = ----- X 100 %

Rencana

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Kategori Capaian Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91≤	Sangat Baik	Biru
2	76≤90	Tinggi	Hijau Muda
3	66≤75	Sedang	Kuning Tua
4	51≤65	Rendah	Kuning Muda
5	≤50	Sangat Rendah	Merah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

3.1.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Selain itu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Capaian Indikator Kinerja Utama ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Tujuan DPKP Tahun 2023

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terpenuhinya standar pelayanan perkotaan	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang	Sedang	100%
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Opini BPK	1. 60,73 (B) 2. WTP	1. 60,73 (B) 2. WTP	100%

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja DPKP Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Ket.
1	Berkurangnya luasan banjir	Presentase Luasan Banjir	0,219%	0,213%	97,26%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,036%	0,036%	100,00%	Sangat Baik
3	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang di Kota Cimahi	Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan	100%	100%	100,00%	Sangat Baik
4	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	55 Nilai	55 Nilai	100,00%	Sangat Baik

Table 3.2 di atas menunjukkan persentase capaian kinerja utama tujuan DPKP tahun 2023. Realisasi indikator tujuan pertama yaitu “sedang” dalam satuan indeks dari target “sedang” dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut dinyatakan berhasil karena telah mencapai angka 100%, namun demikian tetap harus ada upaya agar capaian kinerja tujuan tersebut lebih baik lagi ditahun mendatang. Sedangkan untuk realisasi indikator tujuan kedua adalah sebesar 60,73 dengan capaian kinerja 100%. Hal ini juga menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan tersebut dinyatakan dengan kategori baik, namun tetap harus meningkatkan kinerja lebih baik lagi, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi atau

catatan hasil evaluasi kementerian PAN-RB terhadap Indeks Reformasi Birokrasi.

Demikian hal nya dengan capaian yang menjadi indikator Kinerja Utama DPKP Kota Cimahi, yang diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran, yaitu realisasi 4 (empat) indikator kinerja telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja > 91% yaitu 99,32%.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Tahun 2023-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2024 adalah tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, dari 4 sasaran strategis terdapat 4 indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1 diatas.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja sebagaimana tercantum pada beberapa tabel di bawah berikut:

❖ Sasaran ke-1 : Berkurangnya Luasan Banjir

Pencapaian sasaran ke-1 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran ke-1
Berkurangnya Luasan Banjir

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1	Persentase Luasan Banjir	0,219%	0,213%	97,26%

Pada sasaran ke-1 : Berkurangnya Luasan Banjir dapat dilihat capaian 1 indikator kinerja yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja 1 : “Persentase Luasan Banjir” adalah sebesar 0,213% dari target sebesar 0,219% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga presentase capaian kinerja nya adalah 97,26%, untuk indikator Persentase Luasan Banjir sudah sangat baik karena realisasi sudah diatas 90%.

Total luas genangan pada tahun 2023 di Kota Cimahi adalah sebesar 27,4531 Ha. Sedangkan total luas banjir sebesar 9,062 Ha. Sehingga total luasan banjir dan genangan pada tahun 2023 sebesar 36,7871 Ha. Total luas banjir dan genangan yang sudah tertangani tahun 2023 sebesar 2,025 Ha, sehingga menyisakan 34,7421 Ha total luasan banjir dan genangan yang belum tertangani. Maka presentase capaian genangan tahun 2023 adalah 0,61%, sedangkan banjir 0.213%.

Permasalahan :

1. Drainase kota yang masih belum memadai sehingga sering terjadi banjir di beberapa titik;
2. Tidak berfungsinya saluran pembuangan air sebagaimana mestinya;
3. Masih terdapat genangan air di beberapa titik kawasan permukiman;
4. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi;
5. Belum optimalnya penanganan terhadap daerah rawan banjir;
6. Penyumbatan atau tidak mengalirnya saluran.

❖ **Sasaran ke-2 : Meningkatnya kualitas pemukiman**

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Sasaran ke-2
Meningkatnya kualitas pemukiman

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1	Rasio luas kawasan kumuh	0,036%	0,036%	100,00%

Pada sasaran ke 2 : Meningkatnya Kualitas Permukiman dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja “Rasio Luas Kawasan Kumuh” tahun 2023 adalah sebesar 0,036% yang artinya capaian kinerja pada tahun 2023 sangat baik karna mencapai 100%.

Sebagai gambaran penduduk Kota Cimahi Tahun 2023 : 570.829 jiwa, total bangunan rumah sebanyak 124.115 unit, jumlah penduduk mencapai 141,38 jiwa/Ha. Luas kumuh tahun 2023 adalah 141,42 Ha tersebar di 26 RW dan 15 Kelurahan. Penurunan luas kawasan kumuh tahun 2023 adalah sebesar 10.03 Ha atau 0,036%.

- ❖ Untuk pencapaian IKU Rasio Luas Kawasan kumuh ditentukan oleh banyak sekali aspek seperti: Rumah Tidak Layak Huni, Air Bersih dan Air Limbah.

Untuk capaian Air Bersih Kota Cimahi tahun 2023 adalah jumlah air bersih sampai tahun 2023 sebanyak 11.549 rumah atau 9,30% dari total rumah di Kota Cimahi (124.115 unit). Pada tahun 2023 DPKP telah melaksanakan pemasangan sambungan rumah (SR) secara gratis bagi 1.339 bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Cibeuereum dan Cigugur Tengah.

Untuk capaian Air Limbah Domestik saat ini masi terdapat 23.245 rumah (18,45%) belum memiliki septictank atau masih buang air besar sembarangan (BABS) terutama ke sungai/saluran. Jumlah septictank baik komunal maupun individual yyang telah dibangun adalah 148 septictank komunal dan 6.276 septictank individual, dengan jumlah rumah yang dilayani sebanyak 20.857 SR, 817 SR diantaranya dibangun di tahun 2023.

Permasalahan :

➤ Kawasan Kumuh

1. Belum maksimalnya infrastruktur yang tersedia sebagai faktor utama yang mendukung terciptanya kawasan permukiman yang efektif;
2. Peningkatan layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi;
3. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan penyediaan rumah murah karena mahalnnya harga tanah/ lahan;
4. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang khususnya dalam hal yang terkait dengan penataan kawasan permukiman serta alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan yang lain;
5. Penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan serta dekorasi kota;

➤ Air Bersih

1. Pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang tinggi tetap tidak diimbangi dengan penyediaan air bersih. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan sumber air baku di Kota Cimahi;
2. Keterbatasan anggaran untuk pembangunan sarana /prasarana air bersih;
3. Peningkatan layanan air bersih perpipaan belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;
4. Kualitas air tanah mulai tercemar/ tidak layak minum;
5. Lambannya program penyediaan SPAM regional;
6. Tidak berjalannya/ tidak optimalnya kelompok pengguna dan pemanfaat air

➤ Air Limbah Domestik

1. Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL;
2. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPT ALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja;

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang;
4. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang;
5. Penyedotan lumpur tinja oleh UPT ALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot;
6. Ketersediaan anggaran untuk pembangunan sarana/ prasarana air limbah.

❖ **Sasaran ke-3 : Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik**

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran ke-3
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1	Reformasi Birokrasi	55%	55%	100,00%

Pada sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja “Reformasi Birokrasi” tahun 2023 adalah sebesar 55%. Yang artinya capaian kinerja Reformasi Birokrasi sudah sangat baik karena berhasil mencapai target 100%.

❖ **Sasaran ke-4 : Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Perencanaan Ruang di Kota Cimahi**

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran ke-3
Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan
Perencanaan Ruang di Kota Cimahi

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja 2023
1	Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan	100%	100%	100,00%

Pada sasaran 4 : Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Perencanaan Ruang di Kota Cimahi dapat dilihat capaian indikator kinerja nya yaitu :

- ❖ Capaian realisasi indikator kinerja “Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan” tahun 2023 adalah sebesar 100%. Yang artinya capaian kinerja Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan sudah sangat baik karena berhasil mencapai 100%.

3.2.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja serta Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur sasaran dan indikator sasaran sehingga sasaran dan indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat disandingkan sengan sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2022, termasuk indikator program, inidkator kegiatan, serta indikator sub kegiatan. Hal ini juga menjadi dasar tidak dapat disandingkannya realisasi capaian beberapa indikator kinerja saasaran dan program pada tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum pada table 3.8 dan table 3.9.

Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 diuraikan pada tabel 3.8 di bawah ini.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja DPKP Tahun 2023 dengan tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	100%	98,08%	98,08%	-	-	-	Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
		Rasio Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	156,47 Ha	5,02 Ha	3,21%	-	-	-	
2	Meningkatnya Pelayanan Air Bersih/ Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	69,82%	79,36%	113,66%	-	-	-	Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
3	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	77,48%	80,80%	104,28%	-	-	-	Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
4	Berkurangnya luasan banjir	Presentase Luasan Banjir	-	-	-	0,219%	0,213%	97,26%	Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
5	Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh	-	-	-	0,036%	0,036%	100%	Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
6	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang di Kota Cimahi	Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan	-	-	-	100%	100%	100%	Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
7	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	-	-	-	55 Nilai	55 Nilai	100%	Terdapat perubahan sasaran dan indikator sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

Secara keseluruhan data pada tabel 3.8 mengenai capaian kinerja DPKP Kota Cimahi Tahun 2022 telah mencapai target kinerja hanya saja untuk indikator sasaran ”rasio luas kawasan kumuh sedang dan ringan” capaian kinerja hanya 3,21% hal ini dikarenakan terdapat SK Walikota tentang Luas Kawasan Kumuh terbaru yang diterbitkan pada tahun 2021 menggantikan SK yang lama sehingga luas kawasan kumuh yang harus ditangani menjadi bertambah.

Capaian kinerja DPKP Tahun 2023 berdasarkan indikator kinerja sasaran dinyatakan ”berhasil atau sangat baik”, yaitu rata-rata capaian 99,32%.

Capaian kinerja indikator yang mencapai atau melebihi target diantaranya:

- a) Persentase Luasan Banjir;
- b) Rasio Luas Kawasan Kumuh;
- c) Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan;
- d) Reformasi Birokrasi.

3.2.4 Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023-2026

Capaian kinerja berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023 merupakan capaian kinerja tahun pertama periode Renstra DPKP Tahun 2023-2026. Adapun tingkat capaian kinerja Renstra DPKP sampai dengan tahun 2023 diuraikan pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja DPKP Tahun 2023 dengan Target Kinerja Renstra DPKP Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Renstra s.d Tahun 2023
Berkurangnya luasan banjir	Presentase Luasan Banjir	0,219%	0,213%	97,26%	0,216%	98,61%
Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh	0,036%	0,036%	100%	0,027%	133%
Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang di Kota Cimahi	Persentase penyelesaian adminitrasi pertanahan	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Renstra s.d Tahun 2023
Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi	55 Nilai	55 Nilai	100%	58 Nilai	94,83%

3.2.4 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Kerja Nasional

Bahwa tidak ada perbandingan capaian kinerja dengan capaian nasional.

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

Realisasi Biaya

Persentase Efisiensi Biaya = ----- X 100 %

Target Biaya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya biaya setiap program dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (6=4/2*100)
		Rp	Rp	%	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.777.753.021,00	5.164.251.608,00	89,38	89%
2	Program Pengelolaan dan Pengebangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.438.599.202,00	17.646.116.885,00	90,78	91%
3	Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.089.106.059,00	11.165.581.377,00	92,36	92%

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	PENYERAPAN ANGGARAN		TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (6=4/2*100)
		Rp	Rp	%	%
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase	5.803.512.728,00	5.531.113.357,00	95,31	95%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.309.706.819,00	13.434.635.307,00	93,88	94%
7	Program Pengembangan Perumahan	3.900.253.550,00	3.588.145.201,00	92,00	92%
8	Program Kawasan Permukiman	13.351.337.528,00	12.728.129.863,00	95,33	95%
9	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas	19.396.218.379,00	19.082.808.769,00	98,38	98%
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	80.000.000,00	11.700.000,00	14,63	15%
TOTAL ANGGARAN		94.146.487.286,00	88.352.482.367,00	93,85	94%

Pada tahun 2023 realisasi anggaran untuk semua program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah **Rp. 88.3542.482.367,00**. Sementara target anggaran untuk semua program yaitu **Rp. 94.146.487.286,00**. Dengan perhitungan efisiensi diatas, diperoleh presentase **94%**.

Upaya yang dilakukan ke depan, untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dan waktu adalah dengan melakukan proses penyederhanaan desain dan penggunaan material yang minimalis, sehingga pencapaian target diharapkan dapat dicapai secara efisien.

3.4 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber

pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2023 belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terdiri atas belanja operasi dan belanja modal yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”. Uraian belanja operasi dan belanja modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

3.4.1 Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Pendapatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			KEUANGAN	
		Rp	Rp	%
1.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	150.000.000,00	183.061.250,00	122,04%
2.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	96.000.000,00	179.240.000,00	186,71%
3.	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	54.000.000,00	53.981.000,00	99,96%
4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.166.899.145,00	3.432.482.500,00	108,39%
5.	Pendapatan BLUD	4.765.990.640,00	5.590.343.514,00	117,30%
	TOTAL	8.232.889.785,00	9.439.108.264,00	114,65%

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 8.232.889.785,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp 9.439.108.264,00** atau realisasi keuangan sebesar **114,65%**, rata-rata realisasi pendapatan di Tahun 2023 telah mencapai target bahkan sudah melebihi angka yang ditargetkan. Hal ini menandakan tingkat kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam membayar retribusi sudah baik. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari :

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan pendapatan BLUD Air Minum.

3.4.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2023

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
1	Belanja Operasi	73.969.204.724,00	69.247.313.824,00	93,62%
2	Belanja Modal	20.177.282.562,00	19.105.168.543,00	94,69%
	TOTAL	94.146.487.286,00	88.352.482.367,00	93,85%

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, dapat dianalisa sebagai berikut:

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 94.146.487.286,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp 88.352.482.367,00** atau realisasi keuangan sebesar **93,85%**.

1) Belanja Operasi

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Belanja Operasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran Rp	Realisasi		
			Fisik %	Keuangan Rp	%
1	Belanja Pegawai	11.266.032.892,00	100	10.763.539.919,00	95,54
2	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.992.340.485,00	100	3.781.441.653,00	94,72
3	Belanja Gaji Pokok ASN	2.799.972.000,00	100	2.761.488.180,00	98,63
4	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	309.302.000,00	100	291.773.237,00	94,33

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
5	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	175.378.000,00	100	156.450.000,00	89,21
6	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	22.120.000,00	100	10.570.000,00	47,78
7	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	116.172.000,00	100	103.230.000,00	88,86
8	Belanja Tunjangan Beras ASN	217.961.800,00	100	190.537.020,00	87,42
9	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.204.200,00	100	1.273.664,00	30,30
10	Belanja Pembulatan Gaji ASN	79.401,00	100	39.026,00	49,15
11	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	313.223.928,00	100	243.352.824,00	77,69
12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	12.000.792,00	100	5.681.875,00	47,35
13	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.926.364,00	100	17.045.827,00	77,74
14	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.308.888.000,00	100	4.235.564.000,00	98,30
15	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.284.768.000,00	100	1.266.039.600,00	98,54
16	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	618.120.000,00	100	608.166.400,00	98,39
17	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.406.000.000,00	100	2.361.358.000,00	98,14
18	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	636.000.000,00	100	607.750.000,00	95,56
19	Belanja Honorarium	624.000.000,00	100	601.750.000,00	96,43
20	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	12.000.000,00	100	6.000.000,00	50,00
21	Belanja Pegawai BLUD	2.328.804.407,00	100	2.138.784.266,00	91,84
22	Belanja Pegawai BLUD	2.328.804.407,00	100	2.138.784.266,00	91,84
23	Belanja Barang dan Jasa	62.703.171.832,00	100	58.483.773.905,00	93,27
24	Belanja Barang	25.263.205.092,00	100	24.354.229.632,00	96,40
25	Belanja Barang Pakai Habis	25.263.205.092,00	100	24.354.229.632,00	96,40
26	Belanja Jasa	24.737.395.668,00	100	22.745.417.957,00	91,95
27	Belanja Jasa Kantor	18.846.610.700,00	100	17.671.239.311,00	93,76
28	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	488.399.032,00	100	389.000.877,00	79,65
29	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.690.000,00	100	30.520.000,00	62,68
30	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	407.900.000,00	100	302.350.000,00	74,12
31	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.939.295.936,00	100	4.345.807.769,00	87,98

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
32	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.500.000,00	100	6.500.000,00	100,00
33	Belanja Pemeliharaan	2.370.021.755,00	100	1.959.925.012,00	82,70
34	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.440.136.000,00	100	1.064.067.677,00	73,89
35	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	756.757.080,00	100	723.206.936,00	95,57
36	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	173.128.675,00	100	172.650.399,00	99,72
37	Belanja Perjalanan Dinas	688.774.000,00	100	660.148.582,00	95,84
38	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	688.774.000,00	100	660.148.582,00	95,84
39	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.246.267.500,00	100	6.117.487.955,00	97,94
40	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.182.000.000,00	100	3.182.000.000,00	100,00
41	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.064.267.500,00	100	2.935.487.955,00	95,80
42	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.397.507.817,00	100	2.646.564.767,00	77,90
43	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.397.507.817,00	100	2.646.564.767,00	77,90
	JUMLAH BELANJA OPERASI	74.879.933.480,00	100	68.259.088.546,00	91,16

Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 74.879.933.480,00** penyerapan secara presentase keuangan adalah **91,16%** yakni sebesar **Rp 68.259.088.546,00**

2) Belanja Modal

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.355.684.800	100	2.136.044.191	90,68

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
2	Belanja Modal Alat Besar	25.678.500	100	21.650.000	84,31
3	Belanja Modal Alat Bantu	25.678.500	100	21.650.000	84,31
4	Belanja Modal Alat Angkutan	1.203.717.750	100	1.168.500.000	97,07
5	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.203.717.750	100	1.168.500.000	97,07
6	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.044.600	100	6.900.000	43,01
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.670.600	100	4.600.000	98,49
8	Belanja Modal Alat Ukur	11.374.000	100	2.300.000	20,22
9	Belanja Modal Alat Pertanian	53.380.800	100	53.006.481	99,30
10	Belanja Modal Alat Pengolahan	53.380.800	100	53.006.481	99,30
11	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.572.000	100	41.710.000	89,56
12	Belanja Modal Alat Kantor	10.536.000	100	8.660.000	82,19
13	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	36.036.000	100	33.050.000	91,71
14	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	17.217.000	100	12.654.000	73,50
15	Belanja Modal Alat Studio	17.217.000	100	12.654.000	73,50
16	Belanja Modal Komputer	417.074.150	100	383.566.000	91,97
17	Belanja Modal Komputer Unit	360.245.150	100	329.590.000	91,49
18	Belanja Modal Peralatan Komputer	56.829.000	100	53.976.000	94,98
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	576.000.000	100	448.057.710	77,79
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	576.000.000	100	448.057.710	77,79
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.118.047.730	100	1.094.118.645	97,86
22	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.118.047.730	100	1.094.118.645	97,86
23	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.118.047.730	100	1.094.118.645	97,86
24	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.483.550.032	100	15.688.695.759	95,18
25	Belanja Modal Bangunan Air	14.345.550.032	100	13.558.388.369	94,51

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
		Rp	%	Rp	%
26	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	305.417.896	100	208.425.368	68,24
27	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.173.433.465	100	1.160.848.641	98,93
28	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	3.093.998.671	100	2.946.370.426	95,23
29	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	9.772.700.000	100	9.242.743.934	94,58
30	Belanja Modal Instalasi	2.088.000.000	100	2.080.559.410	99,64
31	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.688.000.000	100	1.682.646.809	99,68
32	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	400.000.000	100	397.912.601	99,48
33	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000	100	49.747.980	99,50
34	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	50.000.000	100	49.747.980	99,50
35	Belanja Modal Aset Lainnya	220.000.000	100	186.309.948	84,69
36	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	220.000.000	100	186.309.948	84,69
37	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	220.000.000	100	186.309.948	84,69
	JUMLAH BELANJA MODAL	20.177.282.562	100	19.105.168.543	94,69

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, dapat dianalisa sebagai berikut:

Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp 20.177.282.562,00** penyerapan secara presentase keuangan adalah **94,69%** yakni sebesar **Rp 419.105.168.543,00**.

3.4.3 Evaluasi Program dan Keuangan Yang Menunjang Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat ditentukan melalui evaluasi

pencapaian output dari setiap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian misi tersebut. Berikut ini merupakan hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman KotaCimahi.

Tabel 3.15
Evaluasi Program dan Kegiatan serta Keuangan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
1	Berkurangnya luasan banjir	Presentase Luasan Banjir		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.777.753.021,00	100	5.777.753.021,00	100	97,74	5.777.753.021,00	89,38	89,38
			1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	79.387.249,00	0	79.387.249,00	100	100	78.322.513,00	98,66	98,66
			2	Rehabilitasi Tanggul Sungai	856.343.078,00	0	856.343.078,00	100	100	836.139.488,00	97,64	97,64
			3	Normalisasi/Restorasi Sungai	1.296.588.965,00	0	1.296.588.965,00	100	96,14	1.210.126.941,00	93,33	93,33
			4	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	66.015.000,00	0	66.015.000,00	100	100	35.208.000,00	53,33	53,33
			5	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	139.887.802,00	0	139.887.802,00	100	96,15	105.954.010,00	75,74	75,74
			6	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	2.754.059.931,00	100	2.754.059.931,00	100	100	2.473.847.513,00	89,83	89,83
			7	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	240.256.143,00	0	240.256.143,00	100	98,29	209.213.068,00	87,08	87,08
			8	Rehabilitasi Bendung Irigasi	70.731.203,00	0	70.731.203,00	100	0	0,00	0,00	0,00
			9	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	274.483.650,00	0	274.483.650,00	100	99,93	215.440.075,00	78,49	78,49

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.803.512.728,00	26,76	5.803.512.728,00	100	100	5.531.113.357,00	95,31	95,31
			10	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	177.426.035,00	0	177.426.035,00	100	100	145.521.766,00	82,02	82,02
			11	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	200.000.000,00	0	200.000.000,00	100	100	197.941.804,00	98,97	98,97
			12	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	165.343.672,00	0	165.343.672,00	100	100	136.879.931,00	82,79	82,79
			13	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.116.505.127,00	0	1.116.505.127,00	100	100	1.108.639.683,00	99,30	99,30
			14	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	2.488.708.658,00	0	2.488.708.658,00	100	100	2.387.865.540,00	95,95	95,95
			15	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	693.816.900,00	100	693.816.900,00	100	100	684.074.906,00	98,60	98,60
			16	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	102.693.950,00	0	102.693.950,00	100	100	97.278.368,00	94,73	94,73
			17	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	859.018.386,00	100	859.018.386,00	100	100	772.911.359,00	89,98	89,98
2	Meningkatnya kualitas pemukiman	Rasio luas kawasan kumuh		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	19.438.599.202,00	100	19.438.599.202,00	100	95,55	17.990.705.723,00	92,55	92,55
			18	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.461.078.978,00	100	1.461.078.978,00	100	100	1.383.769.119,00	94,71	94,71
			19	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	899.908.000,00	100	899.908.000,00	100	100	870.031.194,00	96,68	96,68

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			20	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	2.100.000.000,00	0	2.100.000.000,00	100	100	2.041.822.344,00	97,23	97,23
			21	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.540.000.000,00	100	6.540.000.000,00	100	98,47	6.005.958.610,00	91,83	91,83
			22	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	89.300.000,00	0	89.300.000,00	100	100	82.192.500,00	92,04	92,04
			23	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.996.000.000,00	100	1.996.000.000,00	100	100	1.979.188.395,00	99,16	99,16
			24	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	6.352.312.224,00	100	6.352.312.224,00	100	100	5.627.743.561,00	88,59	88,59
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	12.089.106.059,00	100	12.089.106.059,00	100	97,46	11.165.581.377,00	92,36	92,36
			25	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	4.792.583.200,00	100	4.792.583.200,00	100	99,64	4.743.462.300,00	98,98	98,98
			26	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.863.927.309,00	100	1.863.927.309,00	100	99,46	1.716.568.916,00	92,09	92,09
			27	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	430.321.500,00	100	430.321.500,00	100	100	253.487.500,00	58,91	58,91
			28	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	100	471.240.752,00	78,54	78,54

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			29	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	1.293.200.000,00	100	1.293.200.000,00	100	100	1.234.988.937,00	95,50	95,50
			30	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	215.545.000,00	100	215.545.000,00	100	100	186.194.000,00	86,38	86,38
			31	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	178.325.000,00	100	178.325.000,00	100	100	100.765.000,00	56,51	56,51
			32	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.393.638.400,00	100	1.393.638.400,00	100	99,35	1.320.156.724,00	94,73	94,73
			33	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	585.081.250,00	0	585.081.250,00	100	99,84	532.731.000,00	91,05	91,05
			34	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	736.484.400,00	100	736.484.400,00	100	100	605.986.248,00	82,28	82,28
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19.396.218.379,00	100	19.396.218.379,00	100	100	19.082.808.769,00	98,38	98,38
			35	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4.336.439.035,00	100	4.336.439.035,00	100	100	4.207.181.281,00	97,02	97,02
			36	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	15.059.779.344,00	100	15.059.779.344,00	100	100	14.875.627.488,00	98,78	98,78
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.900.253.550,00	100	3.900.253.550,00	100	100	3.588.145.201,00	92,00	92,00
			37	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	16.180.000,00	0	16.180.000,00	100	100	16.180.000,00	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			38	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	3.884.073.550,00	100	3.884.073.550,00	100	100	3.571.965.201,00	91,96	91,96
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	13.351.337.528,00	93,017	13.351.337.528,00	100	99,819 51593	12.728.129.863,00	95,33	95,33
			39	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	655.500.000,00	0	655.500.000,00	100	100	655.500.000,00	100	100
			40	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	370.526.000,00	100	370.526.000,00	100	100	258.804.000,00	69,85	69,85
			41	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	276.792.716,00	0	276.792.716,00	100	100	274.992.081,00	99,35	99,35
			42	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	12.048.518.812,00	100	12.048.518.812,00	100	99,8	11.538.833.782,00	95,77	95,77
3	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	Reformasi Birokrasi		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.309.706.819,00	94,91	14.309.706.819,00	100	95,01	13.434.635.307,00	93,88	98,92
			43	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.641.900,00	0	75.641.900,00	100	100	73.297.800,00	96,90	96,90
			44	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.592.722,00	100	93.592.722,00	100	100	91.455.098,00	97,72	97,72
			45	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.937.228.485,00	100	8.937.228.485,00	100	100	8.624.755.653,00	96,50	96,50
			46	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.788.100,00	0	7.788.100,00	100	100	7.314.600,00	93,92	93,92

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			47	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	86.309.000,00	100	86.309.000,00	100	100	85.849.140,00	99,47	99,47
			48	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	286.610.000,00	100	286.610.000,00	100	100	255.757.706,00	89,24	89,24
			49	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.955.000,00	0	1.955.000,00	100	100	1.928.000,00	98,62	98,62
			50	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.256.836,00	100	236.256.836,00	100	100	211.407.724,00	89,48	89,48
			51	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.692.200,00	100	36.692.200,00	100	100	34.707.500,00	94,59	94,59
			52	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.444.000,00	100	42.444.000,00	100	100	35.964.000,00	84,73	84,73
			53	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.000.000,00	0	16.000.000,00	100	100	14.880.000,00	93,00	93,00
			54	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.115.000,00	100	272.115.000,00	100	100	268.366.582,00	98,62	98,62
			55	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	511.970.000,00	0	511.970.000,00	100	100	456.280.592,00	89,12	89,12
			56	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	116.845.208,00	100	116.845.208,00	100	100	114.639.172,00	98,11	98,11
			57	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	643.440.600,00	100	643.440.600,00	100	100	634.687.616,00	98,64	98,64
			58	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.257.736,00	100	42.257.736,00	100	100	40.693.747,00	96,30	96,30

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	No	Program/Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Rencana			Realisasi			
						Fisik (%)	Keuangan		Fisik (%)	Keuangan		
							Rp	%		Rp	% Terhadap Rencana	% Terhadap Pagu Anggaran
			59	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.176.896.032,00	100	1.176.896.032,00	100	100	807.107.081,00	68,58	68,58
			60	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.020.000,00	0	38.020.000,00	100	100	26.532.450,00	69,79	69,79
			61	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	671.400.000,00	0	671.400.000,00	100	100	670.000.000,00	99,79	99,79
			62	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	1.016.244.000,00	100	1.016.244.000,00	100	100	979.010.846,00	96,34	96,34
4	Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruang di Kota Cimahi	Persentase penyelesaian administrasi pertanahan		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	80.000.000,00	0	80.000.000,00	100	65	11.700.000,00	14,63	14,63
			63	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0	80.000.000,00	100	65	11.700.000,00	14,63	14,63
TOTAL/RATA-RATA					94.146.487.286,00	86,829	94.146.487.286,00	100	99,66	88.697.071.205,00	94,21	94,21

BAB IV

PENUTUP

4.1 Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dinas dalam mengelola sumberdaya dan kebijaksanaan. Pengelolaan tersebut dirumuskan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Melalui evaluasi berdasarkan sasaran yang ditetapkan sesuai visi dan misi serta dengan menggunakan strategi dan cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran, dapat dilakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022, dapat dianalisa sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 8.232.889.785,00** terealisasi pendapatannya sebesar **Rp. 9.439.108.264,00** atau realisasi keuangan sebesar **114,65** %. Pendapatan yang didapat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berasal dari : Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan pendapatan BLUD Air Minum.
2. Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terdiri dari :
 - a. Belanja Operasi
 - b. Belanja Modal

Berdasarkan Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, dapat dianalisa sebagai berikut :

Belanja Operasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 73.969.204.724,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 69.247.313.824,00** atau realisasi keuangan sebesar **93,62%**.

Belanja Modal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023 dari rencana yang ditargetkan sebesar **Rp. 20.177.282.562,00** terealisasi penggunaannya sebesar **Rp. 19.105.168.543,00** atau realisasi keuangan sebesar **94,69%**. Hal tersebut menunjukkan kinerja DPKP Kota Cimahi baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan Sasaran Strategis yang diukur melalui 4 (empat) Indikator Sasaran yaitu, Persentase Luasan Banjir, Rasio Luas Kawasan Kumuh, Reformasi Birokrasi, Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan. Pencapaian ke 4 (empat) Indikator Sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase luasan banjir sudah sangat baik dari target 0,219% terealisasi 0,213%, dengan capaian kinerja 97,26%.
2. Rasio luas kawasan kumuh sudah sangat baik dari target 0,036% terealisasi 0,036% dengan capaian 100%.
3. Reformasi Birokrasi sudah sangat baik dengan tingkat capaian 100%.
4. Persentase penyelesaian administrasi pertanahan sudah sangat baik dengan tingkat capaian 100%.

Secara umum capaian Indikator Sasaran strategis menunjukkan keberhasilan, meskipun masih terdapat indikator yang masih belum mencapai target yang diharapkan.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2023, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas tingkat keberhasilan, permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam penyelesaian pekerjaan, serta mendorong aparaturnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk selalu meningkatkan kinerja. Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja dimasa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai

instansi di pusat maupun daerah, serta masyarakat akan dilakukan dengan lebih intensif.

Cimahi, 18 Maret 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAHI**

ENDANG, S.IP., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197006241998031009